



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2019**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
2019**

Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang Kode Pos 52312 Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0284) 321029 Faks (0284) 321287
Email : bpkadkabpemalang@gmail.com

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 berisi tentang hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pada BPKAD pada Tahun 2018, pencapaian target yang telah ditetapkan pada Tahun 2018 serta rencana pelaksanaan program kegiatan pada Tahun 2019 termasuk pencapaian kinerjanya, sebagaimana tercantum pada RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2019.

Renja Tahun 2019 tidak bergeser dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BPKAD 2016 -2021 dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021.

Penyusunan Renja Tahun 2019 dimaksudkan memberikan pedoman dan kerangka acuan pelaksanaan program dan kegiatan agar berkesinambungan sehingga dapat berkontribusi dalam perwujudan visi misi Kabupaten Pemalang.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis BPKAD, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun 2019 merupakan dokumen Perencanaan BPKAD yang telah melalui proses evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan sebelumnya. Renja BPKAD Tahun 2019 bertujuan memberi pedoman kepada semua bidang dan sekretariat di BPKAD dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada APBD Tahun Anggaran 2019.

Pemalang, 30 Oktober 2019

**KEPALA BPKAD
KABUPATEN PEMALANG**

W JOKO SUSILO, SH, MAP
Pembina Utama Muda
19661224 199203 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 SistematikaPenulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPKAD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD sampai dengan Juni Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Pematang.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah	32
2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah	43
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	57
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	57
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD	57
3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019.....	59
BAB IV PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel : 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018	16
Tabel : 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang..	31
Tabel :2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Pemalang	44
Tabel : 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Rencana 2020	60

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 1.1 : Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Dokumen yang memuat tentang rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang selama 1 (satu) tahun anggaran, baik dari sisi anggaran maupun kinerjanya.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pemalang yang terjabarkan dalam program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang mempedomani arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2019;
3. Renja-PD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2018, dengan mempertimbangkan sejauh mana capaian kinerja yang telah tercapai pada tahun 2018 serta mengakomodir kebutuhan-kebutuhan mendesak dan krusial yang harus dipenuhi pada APBD Tahun 2019.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini :

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 41). Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 bahwa BPKAD merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun fungsi yang diselenggarakan BPKAD dalam melaksanakan tugas tersebut adalah :

- Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hal penyampaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, senantiasa disinergikan dan disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Visi **“Terwujudnya Pematang Hebat yang Berdaulat, Berjati diri, Mandiri dan Sejahtera”** yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pematang Tahun 2019 sesuai Peraturan Bupati Pematang Nomor 44 Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 41);
24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 44) ;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Hari Tahun 2019 adalah :

- a) Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2019;
- b) Mewujudkan Sinergitas Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2019.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuannya sebagai berikut:

- a. Menjadi acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Hari dalam menyusun rencana program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pematang Hari Tahun 2019;
- b. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan seluruh Bidang pelaksana teknis Program dan Kegiatan;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan anggaran dalam peningkatan kinerja;
- d. Menjadi acuan bagi seluruh bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Hari karena memuat arah dan kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Hari Perubahan Tahun 2019 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD

TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2018 dan Capaian Renstra BPKAD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD

3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Evaluasi dilakukan guna melihat sejauh mana pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan kemudian mengukur tingkat pencapaian dengan melihat kendala atau permasalahan yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang ditetapkan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang menetapkan Rencana Kerja Tahun 2018 dengan mengacu program dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran-Penetapan Pagu Anggaran Pendapatan Sementara (KUA-PPAS) yang meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 19 kegiatan;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 12 kegiatan;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 6 kegiatan;
5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang terdiri dari 1 kegiatan;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 26 kegiatan.

Indikator Hasil Program Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 untuk mendukung Sasaran Rencana Strategis (Renstra) sebagai berikut :

I. Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan, melalui Program Pelayanan administrasi Perkantoran dengan melaksanakan kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 7.700 surat/nota dinas;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik targetnya 4 jenis kebutuhan;
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan target 154 unit;
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/opersional dengan target perijinan untuk 32 kendaraan;
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan target untuk 14 SK, 24 Laporan;
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang dianggarkan untuk 12 bulan;
7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan target untuk 10 unit;
8. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan target 1 Paket, 30 Toner;
9. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan targetnya 3 Paket, 15 buah;
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dianggarkan untuk 12 bulan;
11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 5 unit, 80 buah;
12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target 1 paket, 12 bulan;
13. Penyediaan Makanan & Minuman dengan target 12 bulan, 4 jenis;
14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dianggarkan untuk 12 bulan;
15. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dana Transfer Daerah dengan target 24 Laporan
16. Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan dengan target 100 Laporan;

17. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Perbendaharaan dengan target 10.000 SP2D;
18. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Dana dan Anggaran Kas dengan target 300 SPD;
19. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Gaji dengan target 500 SKPP.

II. Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan, melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan target 43 unit roda 4, 9 unit roda 2;
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 3 unit;
3. Pengadaan Meubeleur dengan target 23unit;
4. Pengadaan Komputer dan perlengkapannya dengan target 25 unit;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan target 2 lokal/unit, 12 bulan Gedung Kantor BPKAD;
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dengan target 1 unit, 12 bulan;
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan Target 32 unit;
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 10 Jenis, 12 bulan;
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan target 1 unit;
10. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur dengan target 1 set, 12 bulan;
11. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya dengan target 50 unit;
12. Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi dengan target 1 sistem (Simda 2.7) dan 1 jaringan.

III. Indikator hasil program prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN melalui program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan target 10 orang.

IV. Indikator hasil program jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia melalui program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 15 buku, 16 Dokumen;
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan target 20 Buku;
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan target 20 Buku;
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Konsolidasi dengan target 100 buku, 3 dokumen;
5. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Konsolidasi dengan target 138 buku;
6. Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan target 24 laporan;

V. Indikator hasil program prosentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia melalui program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD dengan kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan target 130 buku;

VI. Indikator hasil program opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Standar Satuan Harga dengan target 300 Buku;
2. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
3. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, target 200 Buku;

4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, target 2 paket;
5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, target 2 paket;
6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, target 2 paket;
7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, target 2 paket;
8. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, target 815 Buku;
9. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, target 139 Buku;
10. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Target 120 orang;
11. Sertifikasi tanah milik pemerintah Kabupaten Pematang dengan target 46 sertifikat, 96 papan;
12. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS dengan target 12.400 dokumen;
13. Pembayaran PBB aset daerah/BMD dengan target 150 SPT;
14. Pendistribusian Barang Milik Daerah dengan target 3 kali kegiatan;
15. Penetapan status pengguna BMD, SK Pengurus Barang, RKBU dan RKPBU dengan target 300 buku;
16. Penyusunan Laporan Semesteran BMD, target 2 laporan;
17. Penyelesaian pemindahtanganan dan penghapusan BMD dengan target 2 laporan;
18. Penyusunan Laporan Realisasi penerimaan BPKAD dengan target 12 laporan;
19. Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dengan target 1 dokumen;
20. Peningkatan Kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dengan target 100 Laporan;
21. Pengelolaan Kerugian Daerah dengan target 4 Laporan;
22. Sosialisasi/peningkatan SDM/pengurus barang/ SIMDA BMD dengan target 100 orang, 3 kali;

23. Pemantauan, pemanfaatan aset/BMD dengan target 12 laporan;
24. Penyusunan Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi) dengan target 1 laporan;
25. Pengelolaan Kas Daerah dengan target 24 Laporan;
26. Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS dengan target 2 Laporan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 dapat diuraikan sebagaimana Tabel 2.1. berikut ini :

Tabel :2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2018			Target Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018		
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah s/d Des2018	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2018 (%)		Realisasi capaian kegiatan s/d bulan Desember Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7)	11=10/4	
	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan										
	Bidang Keuangan										
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan									
01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase jumlah surat yang terkirim dengan baik dengan jumlah surat masuk (surat/notdin)	45.500	22.500	7.700	7.700	100	8000	30.200	66,37
01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan (jenis)	60	24	4	4	100	4	28	46,00
01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Prosentase kendaraan dinas/ operasional (unit)	835	415	155	154	99	185	569	68,00
01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tercapainya prosentase Jasa Pemeliharaan & perizinan Kendaraan dinas (kendaraan)	138	64	32	32	100	53	96	69,57
01	07	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Daerah	Prosentase jumlah SK Bupati tentang PA, KPA, dan bendaharaan SKPD serta Administrasi Keuangan (SK, Laporan)	1.888	944	14 SK, 24 lap	17 SK, 24 lap	121	12 SK, 12 lap, 12 kali	985	52,17
01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase rata - rata pemeliharaan kebersihan kantor (bulan)	60	24	12	12	100	4 orang	36	60,00
01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Mesin Ketik, Mesin Fotocopy dll. (unit)	50	20	10	10	100	10	30	60,00
01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya rata-rata kebutuhan ATK (paket, buah)	5	2	1 paket, 30 toner	1 paket, 30 toner	100	1 paket, 50 toner	3	60,00
01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya rata - rata kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan (paket, buah/lembar)	5	2	3 paket, 15 buah	3 paket, 15 buah	100	6 kali, 1 paket, 12 buah	5	100

01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik penerangan kantor (bulan)	60	24	12	12	100	12	36	60,00
01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan kebutuhan (buah)	773	308	5 unit, 80 buah	5 unit, 80 buah	100	4 jenis	393	50,84
01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase jumlah koran, majalah, buku perundang - undangan dengan kebutuhan (eksmplar, paket)	65	26	12 bulan, 1 paket	12 bulan, 1 paket	100	2 jenis	27	41,53
01	17	Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan & minuman dengan kebutuhan (bulan, jenis)	60	24	12 bulan, 4 jenis	12 bulan, 4 jenis	100	4 jenis	28	46,67
01	18	Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah	Tersedianya jumlah koordinasi & Konsultasi Keluar daerah dengan kebutuhannya (bulan)	60	24	12	12	100	2 jenis	36	60,00
01	21	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dana Transfer Daerah	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan Dana Transfer dari Pusat dan Laporan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil dari Propinsi (Laporan)	108	36	24	24	100	12 lap, 8 lap	60	55,55
01	22	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Tidak Langsung PPKD, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.(Laporan)	480	156	100	100	100	24 lap, 24 lap, 2 lap, 2.750 berkas	256	53,33
01	23	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Perbendaharaan	Prosentase terselesaikannya penelitian dan penerbitan SP2D (lembar)	40.000	14.500	10.000	10.000	100	11.000	24.500	61,25
01	24	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan penyediaan dana dan anggaran kas	Tersusunnya Surat Penyediaan Dana SKPD dan Anggaran Kas (Dokumen)	1.250	500	300	300	100	175 SPD, 100 dok	800	64
01	27	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Gaji	Tersusunnya SKPP dan SP2D Belanja Gaji SKPD	7.500	3.000	500	500	100	500	3.500	46,67
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kondisi Sarana dan Prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan								
02	05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Prosentase kendaraan dinas/ operasional (unit)	145	28	43 unit mobil, 9 unit motor	43 unit mobil, 9 unit motor	100	-	80	55,17
02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor (unit)	13	4	3	3	100	3	7	53,85
02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase jumlah kebutuhan mebeleur (unit)	5	2	23	20	86	17	22	440
02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Prosentase jml kebutuhan komputer terhadap kebutuhan (paket,unit)	43	13	25	25	100	9 unit	38	88,37

02	22	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Prosentase tercukupinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor (bulan, unit)	60	24	12 bulan, 2 unit gedung	12 bulan, 2 unit gedung	100	2 lokal	36	60,00
02	23	Pemeliharaan rutin/ berkala Mobil Jabatan	Prosentase tersedianya pemeliharaan mobil jabatan (bulan)	60	24	1 unit, 12 bulan	1 unit, 12 bulan	100	1 unit	36	60,00
02	24	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Prosentase kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/ Operasional (unit)	60	24	32	32	100	52	56	93,00
02	26	Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (bulan, jenis)	60	24	10 jenis, 12 bulan	10 jenis, 12 bulan	100	33 unit	36	60,00
02	28	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit)	60	24	1 unit genset	1 unit genset	100	1	36	60,00
02	29	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	Prosentase pemeliharaan mebeleur (bulan)	60	24	1 set, 12 bulan	1 set, 12 bulan	100	1	36	60,00
02	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Prosentase terpelihara peralatan komputer & perlengkapannya (unit)	60	24	50	50	100	75	74	123
02	45	Pemeliharaan rutin / berkala software dan sistim informasi	Tersedianya Software Aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah dan BMD yang dapat berjalan dengan baik (sistem,jaringan)	60	24	1 sistem, 1 jaringan	1 sistem, 1 jaringan	100	2	36	60,00
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN								
05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Prosentase jumlah peserta diklat pada BPKAD (orang)	418	196	10	4	40	85	200	47,84
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia								
06	01	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Prosentase terseleakannya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (buku, dok)	55	25	15 buku, 16 dok	15 buku, 16 dok	100	1 dok, 15 dok, 1 dok	56	101
06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Prosentase terseleakannya laporan semesteran SKPD dan Pemerintah Daerah (buku)	95	35	20	20	100	2	55	57,89
06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Prosentase tersedianya laporan akhir tahun Pemerintah Daerah (buku)	95	35	20	20	100	1 lap, 1 dok, 1 dok	55	57.89
06	05	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Konsolidasian	Terselasaikannya laporan semesteran dan Prognosis pemerintah daerah Konsolidasi (dokumen,buku)	547	235	100 buku, 3 dokumen	100 buku, 3 dokumen	100	2 dok, 12 lap	338	61,79

06	07	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun Konsolidasian	Tersedianya Laporan Akhir tahun (dokumen,buku)	360	144	138	138	100	1 LKD 1 dok 1 dok	282	78,33
06	08	Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Prosentase terwujudnya dokumen hasil rekonsialisasi lap. Keuangan/ Pertanggung jawaban antara SKPD & PPKD (laporan)	60	24	24	24	100	24	48	80,00
09		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Prosentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia								
09	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Prosentase tersusunnya RKA,DPA,DPPA dan Renja SKPD tepat waktu (buku, dokumen)	627	213	130	5 dokumen , 105 buku	100	10 dok 3 dok	323	51,51
15		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah								
15	02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Prosentase jumlah Buku perubahan SSH tahun 2015 dan SSH 2016 (buku)	1.010	404	300	300	100	2 dok	704	69,70
15	03	Penyusunan kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah	Prosentase terselesaikannya aplikasi penyusunan kebijakan akuntansi (dokumen,buku)	505	202	0	0	0	1 perbup 1 buku	202	40,00
15	04	Penyusunan Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase terusunnya Buku Penatausahaan Keuangan Daerah (peraturan)	856	403	200	200	100	1	603	70,44
15	06	Penyusunan rancangan Perda tentang APBD	Prosentase tersusunnya perda tentang APBD (paket)	10	4	2	2	100	1	6	60,00
15	07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Prosentase tersusunnya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tentang APBD	10	4	2	2	100	1	6	60,00
15	08	Penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Prosentase tersusunnya perda tentang Perubahan APBD (perda,buku)	10	4	2	2	100	1	6	60,00
15	09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Prosentase tersusunnya peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD (peraturan)	10	4	2	2	100	1	6	60,00
15	10	Penyusunan rancangan Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Prosentase tersusunnya Perda ttg Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD (buku)	4955	2.498	815	815	100	1	3.313	66,86
15	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggung jawaban (buku)	1016	593	139	139	100	1	732	72,04
15	15	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase terlaksananya bintek dan ASN yang mengikuti Bintek (orang)	300	120	120	120	100	1	240	80,00
15	16	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pemalnag	Prosentase jumlah Barang Milik Daerah yang sudah atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang (buah sertifikat)	650	434	46 sertifikat, 96 papan identitas	39 sertifikat, 96 papan identitas	100	44 sertifikat 96 papan	569	87,53

15	20	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS	Prosentase terselesaikannya Laporan Gaji (dokumen)	62.000	24.800	12.400	12.400	100	12.400	37.200	60,00
15	21	Pembayaran PBB Aset Daerah/BMD	Prosentase realisasi PBB yang dibayarkan (SPT)	750	300	150	67	0	78	450	60,00
15	22	Pendistribusian Barang Milik Daerah (BMD)	Prosentase pelaksanaan distribusi sarana dan prasarana (kali)	30	12	3	2	66	4	15	50,00
15	23	Penetapan Status Pengguna BMD, SK Pengurus Barang, RKBU dan RKPBU	Prosentase Tersusunnya SK Penetapan Status Barang daerah, Terlaksananya Porforasi benda-benda berharga dan Tersusunnya SK Pengurus barang & Penyimpan Barang (buku)	3.810	2.604	300	300	100	1 SK 2 SK 2 dok	2.704	70,97
15	24	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	Prosentase Laporan Barang Semesteran yang tersusun dalam satu tahun (laporan)	10	4	2	2	100	2 lap 2 lap	6	60,00
15	25	Penyelesaian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	Prosentase BMD yang dipidahtangankan an dihapus (laporan)	20	8	2	2	100	2	10	50,00
15	26	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan BPKAD	Prosentase tersusunnya laporan realisasi jasa giro dan deposito (Laporan)	120	48	12	12	100	12	60	50,00
15	31	Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Prosentase tersusunnya sistem Akuntansi Keuangan Daerah (dokumen)	760	304	1	1	100	1 perbup	456	60,00
15	35	Peningkatan kapaitas aparatur pengelola keuangan daerah	Prosentase terselenggaranya peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah (orang)	500	200	100	100	100	100	300	60,00
15	54	Pengelolaan Kerugian Daerah	Prosentase tercapainya penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan (temuan pengawasan)	19	7	4	4	100	4	11	57,89
15	55	Sosialisasi/Peningkatan SDM/Pengurus Barang/Simda BMD	Prosentase terlaksananya sosialisasi dan ASN yang mengikuti sosialisasi (orang, kali)	500	200	100 orang, 3 kali	100 orang, 3 kali	100	100	300	60,00
15	56	Pemantauan, Pemanfaatan aset/BMD	Prosentase terlaksananya pemantauan pemanfaatan asset (laporan)	120	48	12	12	100	12	60	50,00
15	57	Penyusunan Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi)	Prosentase tersusunnya Laporan Semesteran BMD konsolidasi (laporan)	10	4	1	1	100	1	5	50,00
15	58	Pengelolaan Kas Daerah	Prosentase terlaksananya koordinasi tentang pengelolaan kas daerah dan tersusunnya laporan mutasi deposito (laporan)	96	48	24	24	100	12 lap 12 lap	60	62,50
15	59	Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS	Prosentase tersusunnya bahan KUA PPAS selama satu tahun (laporan)	8	2	2	2	100	2	4	50,00

Penjelasan :

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2018 secara keseluruhan realisasi kegiatan Belanja Langsung BPKAD sampai dengan Desember 2018 yaitu sebesar Rp.19.428.770.695,00 atau 92,47 % untuk mendanai 6 program 65 kegiatan. Adapun rincian realisasi kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan yang dikelola oleh sekretariat BPKAD Kabupaten Pematang terdiri dari :

1. Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat dengan anggaran Rp.31.180.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Desember sebesar Rp.26.634.500,00 atau 85,42%
2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp.604.000.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar Rp.584.165.254,00 atau 96,72%
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas anggaran semula sebesar Rp.12.620.000,00 terealisasi pada bulan Desember 2018 sebesar Rp.12.508.525,00 atau 99,12%
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan anggaran semula sebesar Rp.208.700.000,00 terealisasi sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar Rp.204.535.000,00 atau 98,00%
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor anggaran semula sebesar Rp.65.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.60.025.500,00 atau 92,35%
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan anggaran yaitu Rp.20.000.000,00. Adapun realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.17.421.300,00 atau 87,11%
7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor anggaran semula sebesar Rp.100.000.000,00. Adapun Realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.99.507.000,00 atau 99,51%
8. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp.155.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.145.590.000,00 atau 93,93%

9. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor anggaran sebesar Rp.10.000.000,00. Adapun realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.9.678.000,00 atau 96,78%
10. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor anggaran sebesar Rp.43.000.000,00. Adapun realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.37.018.800,00 atau 86,09%
11. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan anggaran sebesar Rp.35.000.000,00 dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.27.734.800,00 (79,24%)
12. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman anggaran sebesar Rp.134.900.000,00 dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.118.504.150,00 atau 87,85%
13. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah anggaran sebesar Rp.582.760.500,00. Adapun realisasi kegiatan Tahun 2018 sebesar Rp.269.459.610,00 atau 46,24%
14. Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dana Transfer Daerah anggaran sebesar Rp.116.775.000,00. Adapun realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.100.316.500,00 atau 85,91%
15. Kegiatan Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan anggaran sebesar Rp.325.277.500,00. Realisasi kegiatan Tahun 2018 sebesar Rp.290.707.000,00 atau 89,37%
16. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional anggaran sebesar Rp.11.337.035.000,00 Adapun realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.11.244.546.050,00 atau 99,18%
17. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor anggaran semula sebesar Rp.24.300.000,00. Adapun realisasi Tahun 2018 sebesar Rp. 22.050.000 atau 90,74%
18. Kegiatan Pengadaan Meubeleur anggaran sebesar Rp.32.900.000,00. Adapun realisasi sebesar Rp. 18.650.000 atau 56,69%
19. Kegiatan Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya anggaran sebesar Rp.385.240.000,00. Adapun realisasi Tahun 2018 Rp. 354.200.000 atau 91,94%

20. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.149.334.870,00 atau 99,56%
21. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan anggarannya tetap yaitu sebesar Rp.39.450.000,00 dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.27.683.662,00 atau 70,17%
22. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional anggaran sebesar Rp.144.200.000,00 dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.76.770.220,00 atau 53,24%
23. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor anggaran Rp.30.029.500,00. Adapun realisasi Rp. 16.829.000,00 atau 56,04%
24. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor anggaran sebesar Rp.14.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 12.841.000,00 atau 87,35%
25. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur anggarannya sebesar Rp.5.000.000,00 dengan realisasi Rp.1.000.000,00 atau 20%
26. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Perlengkapannya anggaran sebesar Rp.15.000.000,00 dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.10.210.000,00 atau 68%
27. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan anggaran sebesar Rp.100.020.000,00 dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp. 31.014.245,00 atau 31,01%
28. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (TAPKIN) anggaran sebesar Rp.20.050.000,00 dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.20.050.000,00 atau 100%
29. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran anggaran sebesar Rp.17.225.000,00 dan realisasi sampai Tahun 2018 sebesar Rp. 16.174.167,00 atau 93,90%
30. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun anggaran sebesar Rp.23.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.22.252.500,00 atau 95,92%
31. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD anggarannya sebesar Rp.125.812.500,00 dengan realisasi Rp.125.225.000,00 atau 99,53%

32. Kegiatan Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp.24.650.000,00. Adapun realisasi sebesar Rp. 23.544.000 atau 95,51%
33. Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan BPKAD anggarannya sebesar Rp.79.041.900,00 dengan realisasi sebesar Rp.73.430.000,00 atau 92,90%

B. Kegiatan yang dikelola oleh Bidang Anggaran terdiri dari :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Dana dan Anggaran Kas anggarannya sebesar Rp.123.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.122.729.000,00
2. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga dengan anggaran sebesar Rp.182.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.173.125.700,00
3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD dengan anggaran sebesar Rp.370.000.000,00 dan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.341,948.882,00
4. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.90.943.525,00
5. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD anggaran sebesar Rp.430.000.000,00 dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.421.494.264,00
6. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD anggaran sebesar Rp.96.000.000,00 dengan realisasi Rp.90.223.090,00
7. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah anggarannya sebesar Rp.120.000.000,00 dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.112.571.828,00
8. Kegiatan Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS dengan anggaran sebesar Rp.141.000.000,00 dengan realisasi Rp.135.045.790,00

C. Kegiatan yang dikelola oleh Bidang Perbendaharaan terdiri dari:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Perbendaharaan anggaran sebesar Rp.326.937.000,00 dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.295.902.792,00

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Gaji anggaran sebesar Rp.79.350.000,00 dengan realisasi Rp.72.925.000,00
3. Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah anggaran Rp.178.150.000,00 dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.168.624.842,00
4. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS dengan anggaran Rp.394.100.000,00 dan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.396.225.470,00
5. Kegiatan Pengelolaan Kerugian Daerah memiliki anggaran sebesar Rp.73.732.000,00 dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.62.230.200,00
6. Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah dengan anggaran sebesar Rp.110.845.000,00 dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.98.751.037,00

D. Kegiatan yang dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Aset Daerah terdiri dari :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan BMD anggaran sebesar Rp. 323.000.000. Adapun realisasinya sampai Tahun 2018 sebesar Rp.230.531.322,00
2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi dengan anggaran Rp.191.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.156.422.500,00
3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran konsolidasi dengan anggaran sebesar Rp.94.375.000,00 dan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.81.553.500,00
4. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Konsolidasi dengan anggaran sebesar Rp.275.375.000,00 dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.251.852.242,00
5. Kegiatan Penyusunan Rekonsiliasi data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan anggaran sebesar Rp.147.937.000,00 dan realisasi sebesar Rp.112.829.096,00
6. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ditunda pelaksanaannya karena sistem akuntansi persediaan belum siap sehingga anggaran kegiatan ini pada Tahun 2018 adalah Rp.0,00

7. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD anggaran sebesar Rp.341.375.000,00. Adapun realisasi sebesar Rp.297.865.840
8. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD anggarannya sebesar Rp.57.500.00,00 dengan realisasi Rp.51.683.900,00
9. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah anggarannya sebesar Rp.120.000.000,00. Realisasi kegiatan Tahun 2018 Rp.78.504.900,00
10. Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pemalang anggarannya sebesar Rp.229.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.161.277.900,00
11. Kegiatan Pembayaran PBB Aset Daerah /BMD anggaran sebesar Rp.40.850.000,00. Realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.37.227.505,00
12. Kegiatan Pendistribusian Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp.17.000.000,00 dan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.12.650.000,00.
13. Kegiatan Penetapan Status pengguna BMD, SK pengurus barang, RKBU dan RKPBU anggaran sebesar Rp.105.000.000,00 dengan realisasi Rp.89.301.750,00
14. Kegiatan Penyelesaian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD anggaran sebesar Rp.146.000.000,00 dengan realisasi Rp.130.248.500,00
15. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dengan anggaran Rp.123.000.000,00 dan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp. 92.131.824,00
16. Kegiatan Sosialisasi/Peningkatan SDM/Pengurus Barang/SIMDA BMD dengan anggaran sebesar Rp.189.000.000,00 dan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.157.920.046,00
17. Kegiatan Pemantauan, Pemanfaatan aset/BMD anggaran sebesar Rp.90.000.000,00 dengan realisasi Rp.77.629.000,00
18. Kegiatan Penyusunan Laporan Semesteran BMD Konsolidasi anggaran sebesar Rp.762.000.000,00 dan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.39.364.897,00.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu :

- a. Menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Menyiapkan rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Menyiapkan Surat penyediaan Dana (SPD) dan registernya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan pencatatan register Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- e. Melakukan pengelolaan Belanja Pegawai;
- f. Menyediakan data alokasi kebutuhan gaji PNS dan menghimpun laporan pelaksanaannya;
- g. Melakukan pemeriksaan dan meneliti surat permintaan pembayaran gaji, pensiun serta tunjangan lainnya;
- h. Menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji untuk pensiun, meninggal dunia serta mutasi;
- i. Mengkoordinasikan dan mengajukan kekurangan gaji, kenaikan tingkat, pangkat, berkala, uang duka wafat, serta usulan gaji yang diajukan oleh masing-masing unit kerja;
- j. Menyajikan cetak data gaji Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- k. Menguji kebenaran berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas Keputusan Otorisasi;
- l. Mempersiapkan bahan pertimbangan pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- m. Menyusun konsep rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD;
- n. Mengatur ketersediaan dana Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pemalang;
- o. Menyusun konsep rancangan peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pemalang;

- p. Menyusun konsep rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- q. Menyusun Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pematang Siantar;
- r. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang pengelolaan keuangan daerah;
- s. Melaksanakan kegiatan inventarisasi, pengamanan fisik dan administrasi, pemanfaatan dan distribusi BMD sesuai prosedur pengelolaan BMD

Selain melaksanakan fungsi di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Siantar melaksanakan fungsi sebagai pengelola pendapatan baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun pendapatan yang termasuk dalam Lain-Lain PAD yang sah.

PAD dan Dana Perimbangan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Siantar adalah :

1. PAD

1.1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1.1.1. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

1.1.2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank

1.2. Lain-Lain PAD yang Sah

1.2.1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan

1.2.2. Penerimaan Jasa Giro

1.2.3. Penerimaan Bunga

1.2.4. Tuntutan Kerugian Daerah

1.2.5. Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pekerjaan

1.2.6. Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan

1.2.7. Penerimaan dari Pengembalian

1.2.8. Penerimaan Lain-Lain

1.2.9. Pendapatan Sewa

2. Dana Perimbangan

2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

2.1.1. Bagi Hasil Pajak

2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

- 2.3. Dana Alokasi Khusus
 - 2.3.1. DAK Fisik
 - 2.3.2. DAK Non Fisik
- 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
 - 3.1. Pendapatan Hibah
 - 3.1.1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah
 - 3.1.2. Pendapatan Hibah Dana BOS
 - 3.2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - 3.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
 - 3.3. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
 - 3.3.1. Bantuan Keuangan dari Propinsi
 - 3.4. Alokasi Dana Desa
 - 3.4.1. Alokasi Dana Desa
 - 3.5. Dana Insentif Daerah
 - 3.5.1. Dana Insentif Daerah

Untuk mengevaluasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dengan mengukur capaian kinerja dengan menggunakan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yaitu :

1. Ketepatan Waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD. (Minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk APBD dan Minggu kedua bulan September Tahun Anggaran berjalan untuk Perubahan APBD)
Indikator ini didukung oleh 2 indikator program yaitu ketepatan waktu penyusunan RKA-PD dan ketepatan waktu penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD). Apabila semua SKPD menyusun RKA baik penetapan maupun perubahan APBD telah sesuai ketentuan maka hal ini akan mempercepat penyusunan Raperda APBD maupun Raperda perubahan APBD sehingga raperda APBD maupun Raperda perubahan APBD dapat disampaikan ke DPRD sesuai ketentuan (tepat waktu). Penyusunan SPD sangat tergantung pada anggaran kas yang dientry SKPD ke SIMDA Keuangan pada saat menyusun RKA/RKAP SKPD. Sehingga kedua indikator program ini tidak dapat diabaikan dalam pencapaian IKU pertama BPKAD.

2. SP2D yang diterbitkan tepat waktu (3 hari sesuai SOP)

Rumusan ketercapaian indikator ini adalah jumlah SP2D yang diproses dalam waktu 3 hari sejak dibuatnya SPM SKPD dibanding Jumlah berkas SP2D yang diajukan oleh SKPD. Apabila semua SKPD menyusun SPM sesuai ketentuan maka penerbitan SP2D dapat dilaksanakan sesuai SOP.

3. Penatausahaan aset daerah.

Rumusan ketercapaian indikator ini adalah jumlah aset yang tercatat dalam KIB dibanding jumlah aset yang tercatat pada Neraca Daerah.

Indikator ini didukung 4 indikator program sebagai berikut :

a. Pemanfaatan Aset.

Rumusan ketercapaian indikator program ini adalah jumlah aset daerah yang dimanfaatkan dibanding jumlah seluruh aset daerah yang seharusnya dimanfaatkan.

b. Pengamanan Aset.

Rumusan ketercapaian indikator program ini adalah jumlah tanah milik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya yang telah diproses sertifikatnya dibanding jumlah keseluruhan tanah milik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.

c. Pemindahtanganan Aset.

Rumusan indikator program ini adalah jumlah realisasi pemindahtanganan aset daerah dibanding jumlah aset daerah yang diusulkan SKPD untuk dipindahtangankan.

d. Ketepatan waktu penyusunan Laporan BMD.

Ketentuan penyusunan Laporan BMD paling lambat bulan Maret tahun berikutnya. Indikator program ini sangat terkait dengan kinerja pengurus barang SKPD dalam penyusunan Laporan BMD. BPKAD mengupayakan pendampingan kepada pengurus barang SKPD dalam melakukan entry data ke SIMDA BMD, inventarisasi aset dan penyusunan Laporan BMD agar Laporan BMD Pemkab Pematang Jaya yang merupakan Konsolidasi dari Laporan BMD SKPD dapat disusun sesuai ketentuan (tepat waktu).

Tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah akan mempengaruhi data Laporan Keuangan Daerah karena data aset merupakan bagian pada Neraca yang merupakan salah satu unsur Laporan Keuangan Daerah.

4. Ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD.

Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan disampaikan kepada DPRD pada bulan Juni tahun anggaran berikutnya.

Sebagai pendukung Indikator utama ini adalah indikator program ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Semester Pertama tahun berjalan. Laporan Keuangan semesteran paling lambat disusun pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. BPKAD melakukan desk pada saat penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, diharapkan dengan langkah ini maka Raperda pertanggungjawaban APBD dapat disampaikan kepada DPRD tepat waktu.

5. Ketepatan waktu penyampaian LKD ke BPK.

Ketentuan penyampaian Laporan Keuangan ke BPK RI adalah paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.

IKU ini didukung oleh indikator program yaitu ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD. Apabila SKPD telah menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu maka hal ini akan mempercepat proses penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya. Hasil opini dari Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh BPK RI pada Tahun 2018 adalah “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” . Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target IKU BPKAD yang terdapat pada RPJMD telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Kabupaten Pematang Jaya telah mencapai WTP selama 2 tahun berturut turut atas Laporan Keuangan Tahun 2016 dan Tahun 2017. Keberhasilan tersebut menjadi pemacu Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya untuk mempertahankan prestasi tersebut pada tahun-tahun berikutnya.

2.3 Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yaitumelaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang juga melaksanakan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping melaksanakan tugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Pemalang sebagai SKPKD melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Fungsi BUD tersebut dilaksanakan oleh Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dilaksnakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang selaku PPKD adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Menetapkan Surat Pencairan Dana (SPD);
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Selain fungsi BUD, Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdapat hal-hal yang masuk dalam permasalahan. BPKAD telah berupaya mengambil langkah-langkah solusi terkait permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dengan berlakunya regulasi tentang keterbukaan informasi tersebut mengharuskan BPKAD sebagai perangkat daerah pengelola keuangan dan aset untuk mempublikasikan keuangan dan aset yang dikelolanya kepada masyarakat sebatas informasi/data-data yang tidak termasuk dalam pengecualian. BPKAD dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam menyajikan data-data pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun langkah-langkah yang telah diupayakan oleh BPKAD dalam melaksanakan amanat tersebut adalah :
 - Mempublikasikan Perda APBD dan Perda Pertanggungjawaban APBD kepada publik melalui media masa (surat kabar).
 - Mempublikasikan Laporan Keuangan daerah, Ringkasan APBD, Lampiran III dan IV Peraturan Bupati tentang APBD ke Website BPKAD Kabupaten Pematang Jaya.
 - Menyusun buku Laporan Keuangan Daerah, APBD dan Perubahan APBD serta lampiran-lampirannya untuk didistribusikan kepada perangkat daerah se-Kabupaten Pematang Jaya.
 - Melaksanakan sistem SP2D on line dalam pencairan dana yang bersumber dari APBD.
 - Meng-upload data pencairan SP2D melalui website BPKAD secara realtime.
 - Selalu meng-upload kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang2 di BPKAD Kabupaten Pematang Jaya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah seperti lelang kendaraan dan alat berat, fasilitasi pengelolaan keuangan kepada perangkat daerah se-Kabupaten Pematang Jaya, desk RKA dan RKAP, desk pendapatan daerah, desk penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis, rapat-rapat dalam rangka penyusunan regulasi pengelolaan keuangan seperti peraturan bupati tentang TGR, Hibah Bansos, kebijakan akuntansi dan lain-lain.
2. Terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan agar optimal tetapi terkendala anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan secara bertahap antara lain : sertifikasi Tanah milik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya serta inventarisasi Aset/BMD. Jumlah tanah milik Pemerintah

Kabupaten Pematang Jaya keseluruhan 2.184 bidang tanah. Luasan tersebut tidak dapat diurus sertifikatnya sekaligus mengingat kemampuan keuangan daerah sehingga pensertifikatan tanah dilaksanakan bertahap. Setiap tahun ditargetkan 40 sampai dengan 50 bidang tanah untuk dilaksanakan proses sertifikasinya. Dalam hal inventarisasi aset, masalah yang dihadapi adalah kompetensi SDM Pengurus barang. Sebagian besar pengurus barang belum memahami pengelolaan BMD sesuai Pedoman Pengelolaan BMD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. BPKAD khususnya Bidang Akuntansi dan Aset Daerah berupaya melaksanakan bimtek, sosialisasi dan pendampingan kepada pengurus barang SKPD dalam melaksanakan inventarisasi BMD dan entry data BMD ke SIMDA BMD. Selain kompetensi SDM pengurus barang, hal lain yang menjadi kendala adalah sering bergantinya personil pengurus barang SKPD sehingga mengakibatkan tidak optimalnya laporan barang yang menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain faktor anggaran dan SDM, terdapat faktor lain yaitu pengiriman data aset dari SKPD sering terlambat. Hal ini mengakibatkan banyak aset Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya yang belum terbayar PBB dan asuransinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPKAD telah melakukan langkah - langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke semua perangkat daerah di Kabupaten Pematang Jaya dalam rangka rekonsiliasi data aset yang tercatat di KIB SKPD dengan SIMDA BMD.
 - Melaksanakan cek fisik dan cek lapangan atas data aset yang tercatat pada KIB SKPD.
 - Melaksanakan Bimbingan teknis kepada pengurus barang tentang pengelolaan Barang Milik Daerah terkait pencatatan, pelaporan, penghapusan dan pertanggungjawabannya.
3. Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan Daerah membutuhkan ketepatan waktu dan keakuratan data baik dalam penganggaran dan realisasinya. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan sistem aplikasi yang memadai dan jaringan yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset yang dilaksanakan secara on line. BPKAD telah mengambil langkah solusi untuk permasalahan tersebut yaitu :

- Pemeliharaan sistem dan jaringan SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD secara berkala. BPKAD bekerjasama dengan BPKP dalam pemeliharaan aplikasi SIMDA Keuangan maupun SIMDA BMD. Secara berkala aplikasi tersebut di up grade dan disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelaporan keuangan dan aset daerah. Dari sisi jaringan, BPKAD bekerja sama dengan pihak PT Lawang Sewu. BPKAD menandatangani MOU dengan PT Lawang Sewu untuk penggunaan jaringan Cloud atas SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. Sehingga kedua aplikasi tersebut dapat digunakan secara online oleh semua SKPD dimana pun dan kapan pun. Sebagai pendukung penggunaan cloud, BPKAD bekerjasama dengan pihak PT Telkom dalam penyediaan konektivitas internet yang memadai.

Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*):

Kerjasama Organisasi antar bidang tidak dapat dipisahkan baik internal maupun eksternal sedangkan keberhasilan atau kegagalan organisasi sangat tergantung pada kemampuan manajemen dalam melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang selalu menyesuaikan diri dan berupaya tetap dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang baik internal maupun eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan Program yang telah direncanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah untuk menggunakan metode analisis SWOT, terdiri dari 4 Strategi :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
3. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman;
4. Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman.

A. Kekuatan (*Strengths*), berupa:

Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan dan kelembagaan organisasi dalam Program dan kegiatan maupun pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain:

- Adanya Peraturan Perundang-Undangan nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan demikian akan menjadi penerimaan Daerah dan Belanja Daerah dan disusunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang dan Himpunan Peraturan Bupati Pematang tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pematang. Regulasi tersebut merupakan pedoman bagi semua perangkat daerah sebagai komponen Pemerintah Kabupaten Pematang untuk bergerak dan melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mendukung visi misi Kabupaten Pematang. Peraturan Bupati Pematang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang merupakan pedoman bagi BPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsure penunjang urusan pemerintahan. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang yang digunakan sebagai petunjuk secara teknis operasional bagi seluruh personil BPKAD Kabupaten Pematang;

- Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memadai dalam rangka menjalankan Organisasi, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang berkemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung yang dimiliki merupakan modal bagi pelaksanaan pencapaian tujuan;
- Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh semua unsur Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya, merupakan target yang harus dicapai setiap tahun oleh ASN sebagai bentuk output dari kinerja personal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
- Adanya koordinasi serta jaringan komunikasi kerja terhadap lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas, tersedianya anggaran untuk melaksanakan Program dan Kegiatan serta motivasi dan kemauan kerja yang tinggi.

B. Kelemahan (*Weakness*), berupa:

- Koordinasi Internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas yang kadang masih kurang;
- Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
- Masih adanya pembagian tugas pekerjaan yang belum proposional, penempatan pegawai yang kurang memperhatikan kompetensi kemampuan dan ketrampilan;
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berlatar belakang Keuangan/Akuntansi;
- Kurangnya koordinasi pada masing-masing bidang;
- Masih adanya tanah milik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya yang belum bersertifikat.
- Masih terdapat kelemahan pada SIMDA BMD berupa ketidakmampuan menyajikan data penyusutan per item secara otomatis.

C. Peluang (*Opportunities*), berupa:

- Terjalannya kinerja yang baik dengan mitra kerja yaitu pihak perbankan, BUMD, KPPN, Kementerian Keuangan dan pihak lainnya;
- Dukungan yang baik dan positif dari publik terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
- Tuntutan dari masyarakat dalam hal keterbukaan informasi menjadi motivasi kerja BPKAD untuk selalu berinovasi dan berkinerja atas dasar regulasi yang berlaku.

D. Tantangan (*Threats*), berupa:

- Mekanisme Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur pengelolaan keuangan daerah secara umum sehingga perlu penterjemahan dan penafsiran teknis yang dituangkan dalam regulasi yang merupakan kebijakan local pemerintah Kabupaten Pemalang;
- Beban tugas pekerjaan semakin meningkat sebanding dengan tuntutan kinerja dan output yang optimal;
- Masih banyak pelaksana yang belum menguasai akuntansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Adanya fungsi BPKAD selaku PPKD yang mengelola anggaran hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada desa, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang melibatkan perangkat daerah lain sebagai pengampunya, dalam merealisasikan anggaran belanja tidak langsung PPKD dan pengeluaran pembiayaan. Kondisi ini membutuhkan kompetensi yang memadai, kemampuan berkoordinasi yang baik, ketrampilan dalam memahami regulasi terkait, menterjemahkan realita atau kondisi sebenarnya yang membutuhkan solusi agar sinkron antara penganggaran, peruntukkan dan realisasi belanja.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang terpilih periode 2016-2021 adalah “**Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera**”, dengan Misi :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Dari seluruh kegiatan visi misi Kepala Daerah Kabupaten Pemalang, yang terkait langsung dalam tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah misi ke 6 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

Berdaulat, terkait dengan visi ini, BPKAD telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara utuh sesuai regulasi yang berlaku.

Berjatidiri, bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah merupakan perangkat daerah yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Walaupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya seringkali melibatkan perangkat daerah lain tetapi pelaksanaan kegiatan diupayakan selalu dalam koridor kewenangannya.

Mandiri, hal ini sudah dilakukan dalam bentuk kegiatan pengelolaan pendapatan lain-lain PAD yang sah sebagai pendapatan BPKAD selaku SKPD. Pendapatan tersebut berupa pengelolaan sewa aset berupa tanah dan gedung, penjualan bahan-bahan bekas bongkaran dan hasil penjualan kendaraan dinas roda empat maupun roda dua. Selain itu, BPKAD mengelola pendapatan yang masuk dalam pendapatan BPKAD selaku PPKD yaitu berupa pengelolaan pendapatan jasa giro pemegang kas, jasa giro kas daerah dan pendapatan bunga deposito atas cash idle di RKUD Kabupaten Pematang Jaya.

Walaupun pengaruh pendapatan lain-lain PAD yang sah yang dikelola BPKAD selaku SKPD serta Pendapatan Jasa giro dan Bunga Deposito yang dikelola oleh BPKAD selaku PPKD secara keseluruhan pengaruhnya tidak signifikan terhadap pencapaian target PAD Kabupaten Pematang Jaya, tetapi hal ini telah menunjukkan upaya kemandirian dalam keuangan.

Sejahtera, meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah bertujuan meningkatkan kinerja BPKAD dalam mendukung visi misi Kabupaten Pematang Jaya yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberpihakan anggaran pada kebutuhan masyarakat, peningkatan penyediaan dan perbaikan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum yang memadai merupakan upaya BPKAD dalam turut andil mensejahterakan masyarakat.

Telaahan Kinerja BPKAD

Faktor-Faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD jika ditinjau dari sasaran Rencana Kerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang untuktahun 2019 :

Faktor Penghambat :

1. Jumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Pemalang yang dapat dikelola dalam bentuk sewa tanah dan gedung tidak banyak sehingga perolehan pendapatan sewa belum dapat dijadikan andalan bagi peningkatan PAD.
2. Terbatasnya jumlah uang daerah dalam bentuk cash idle yang dapat didepositokan sementara waktu sehingga perolehan deposito dan jasa giro pun tidak dapat diandalkan sebagai pendukung peningkatan PAD secara signifikan.
3. Adanya aset daerah berupa tanah yang belum bersertifikat menimbulkan kemungkinan hilangnya aset daerah tersebut karena belum jelas kepemilikannya.
4. Inventarisasi aset Daerah belum optimal sehingga nilai aset yang ditampilkan dalam neraca belum sesuai dengan kondisi sebenarnya;

Faktor Pendorong :

1. Adanya dana perimbangan dari pusat, Untuk mendukung pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang.
2. Sarana dan Prasarana yang Memadai, Mempermudah dan memperlancar pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam memberikan pelayanan.
3. Semangat dan Disiplin Kerja dari ASN diBPKAD Kabupaten Pemalang, dapat mendorong upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun SKPD lain secara optimal.
4. Adanya Peluang peningkatan kompetensi bagi pelaksana BPKAD Kabupaten Pemalang dengan mengikuti Bimbingan Teknis. Dengan adanya kesempatan ini membuka peluang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPKAD Kabupaten Pemalang dalam memberikan pelayanan yang maksimal.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Upaya keras yang baik berdampak pada efisiensi pengelolaan keuangan :

- a. Tingkat kualitas Sumber Daya Aparatur untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu ditingkatkan lagi mengingat masih adanya tenaga kontrak yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang produktifitas kerja, berinovasi dan penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat disusun laporan yang akuntabel.
- c. Tingkat koordinasi baik internal maupun eksternal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang perlu ditingkatkan agar dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam penyusunan laporan keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah perlu segera ditingkatkan dengan pelaksanaan pendampingan kepada perangkat daerah, monitoring dan evaluasi hasil inventarisasi aset pada perangkat daerah serta upgrade SIMDA BMD agar dapat disajikan laporan aset yang akuntabel.
- e. Profesionalisme dan disiplin aparatur daerah, kemampuan memfasilitasi, melayani dan bahkan mencari solusi juga merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkelanjutan;

2.4. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pada tabel 2.3 ini disajikan perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 dengan analisis kebutuhan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Pemalang

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Ctn Ptg		
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		15.163.174.000				15.163.174.000		
4	04			<u>Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan</u>		15.163.174.000	-			15.163.174.000		
4	04	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terlaksananya Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran	80%	3.739.627.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terlaksananya Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran	80%	3.739.627.000	
4	04	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim dan jumlah surat yang diterima dalam satu tahun	8.000 surat/ notdin	30.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim dan jumlah surat yang diterima dalam satu tahun	8.000 surat/ notdin	30.000.000	
4	04	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, air, listrik dan internet dalam satu tahun	4 jenis	610.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, air, listrik dan internet dalam satu tahun	4 jenis	610.000.000	
4	04	1	5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang di asuransikan	185 unit	830.000.000	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang di asuransikan	185 unit	830.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg		
Kode Urusan		Kode Program / Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	04	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terlaksananya perijinnannya selama satu tahun	53 unit	15.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terlaksananya perijinnannya selama satu tahun	53 unit	15.000.000	
4	04	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA, KPA dan Bendahara yang tersusun selama satu tahun	12 SK 12 Laporan 12 kali	270.000.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA, KPA dan Bendahara yang tersusun selama satu tahun	12 SK 12 Laporan 12 kali	270.000.000	
4	04	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan, Keindahan dan Ketertiban kantor selama satu tahun	4 orang	85.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan, Keindahan dan Ketertiban kantor selama satu tahun	4 orang	85.000.000	
4	04	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja yang diperbaiki selama satu tahun	10 unit	15.000.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja yang diperbaiki selama satu tahun	10 unit	15.000.000	
4	04	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang di sediakan	1 paket, 50 buah toner	90.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang di sediakan	1 paket, 50 buah toner	90.000.000	
4	04	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 kali, 1 paket, 12 buah	50.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 kali, 1 paket, 12 buah	50.000.000	
4	04	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang di sediakan	12 bulan	15.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang di sediakan	12 bulan	15.000.000	
4	04	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan di sediakan	4 jenis	22.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan di sediakan	4 jenis	22.000.000	
4	04	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran, majalah, dan buku perundang-undangan yg disediakan	2 jenis	25.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Jumlah koran, majalah, dan buku perundang-undangan yg disediakan	2 jenis	25.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Cttn Ptg
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
							perundang-undangan				
4	04	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jml makanan & minuman yg disediakan	4 jenis	135.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Jml makanan & minuman yg disediakan	4 jenis	135.000.000
4	04	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam & keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	2 jenis	450.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam & keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	2 jenis	450.000.000
4	04	1	21	Penyusunan Laporan realisasi penerimaan dana transfer daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan dana transfer	12 lap, 8 lap	190.000.000	Penyusunan Laporan realisasi penerimaan dana transfer daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan dana transfer	12 lap, 8 lap	190.000.000
4	04	1	22	Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran PPKD dan pembiayaan	Jumlah laporan administrasi penyaluran bantuan keuangan sosial, hibah, bunga, belanja tidak terduga kepada masyarakat dan pengeluaran pembiayaan SKPD	24 lap, 24 lap, 2 lap, 2.750 berkas	350.000.000	Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran PPKD dan pembiayaan	Jumlah laporan administrasi penyaluran bantuan keuangan sosial, hibah, bunga, belanja tidak terduga kepada masyarakat dan pengeluaran pembiayaan SKPD	24 lap, 24 lap, 2 lap, 2.750 berkas	350.000.000
4	04	1	23	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan perbendaharaan	Jumlah penerbitan SP2D dan penelitian	11.000 sp2d	349.627.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan perbendaharaan	Jumlah penerbitan SP2D dan penelitian	11.000 sp2d	349.627.000
4	04	1	24	Penyediaan jasa administrasi keuangan penyediaan dana dan anggaran kas	Jumlah surat penyediaan dana SKPD yang terselesaikan	175 SPD, 100 dok	123.000.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan penyediaan dana dan anggaran kas	Jumlah surat penyediaan dana SKPD yang terselesaikan	175 SPD, 100 dok	123.000.000
4	04	1	27	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah SKPP yang diterbitkan	500 skpp	85.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah SKPP yang diterbitkan	500 skpp	85.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg	
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengelolaan Gaji			Pengelolaan Gaji				
4	04	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%	1.150.585.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%	1.150.585.000
4	04	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpenuhi	-	-	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpenuhi	-	-
4	04	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit	25.500.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit	25.500.000
4	04	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dalam Satu tahun	-	-	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dalam Satu tahun	-	-
4	04	2	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler yang terpenuhi	17 unit	42.050.000	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler yang terpenuhi	17 unit	42.050.000
4	04	2	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang tersedia	9 unit	92.000.000	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang tersedia	9 unit	92.000.000
4	04	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 lokal	500.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 lokal	500.000.000
4	04	2	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	1 unit	50.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	1 unit	50.000.000
4	04	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	52 unit	155.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	52 unit	155.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg		
Kode Urusan		Kode Program / Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	04	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	33 unit	30.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	33 unit	30.000.000	
4	04	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	1 unit	15.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	1 unit	15.000.000	
4	04	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpelihara	1 paket	10.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpelihara	1 paket	10.000.000	
4	04	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah peralatan komputer dan perlengkapannya yang terpelihara	75 unit	20.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah peralatan komputer dan perlengkapannya yang terpelihara	75 unit	20.000.000	
4	04	2	45	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi	Jumlah software dan sistim yang dipelihara	2 software	211.035.000	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi	Jumlah software dan sistim yang dipelihara	2 software	211.035.000	
4	04	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80%	450.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80%	450.000.000	
4	04	5	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang ikut sosialisasi	85 orang	450.000.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang ikut sosialisasi	85 orang	450.000.000	
4	04	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80%	874.130.500	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80%	874.130.500	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg		
Kode Urusan		Kode Program / Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
4	04	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Tersusunnya jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dok, 15 dok, 1 dok	64.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Tersusunnya jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dok, 15 dok, 1 dok	64.000.000	
4	04	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	2 dokumen	20.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	2 dokumen	20.000.000	
4	04	6	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 lap, 1 dok, 1 dok	54.000.000	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 lap, 1 dok, 1 dok	54.000.000	
4	04	6	5	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran konsolidasi	Tersedianya jumlah laporan semesteran dan prognosis daerah; Tersedianya jumlah laporan bulanan dan triwulan; Tersedianya jumlah laporan DTH RTH; Tersedianya jml laporan TB/ UB	2 dokumen, 12 laporan	103.812.500	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran konsolidasi	Tersedianya jumlah laporan semesteran dan prognosis daerah; Tersedianya jumlah laporan bulanan dan triwulan; Tersedianya jumlah laporan DTH RTH; Tersedianya jml laporan TB/ UB	2 dokumen, 12 laporan	103.812.500	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg		
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	04	6	7	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2016 (Konsolidasian); Tersusunnya SE Bupati Pemalang tentang Penyusunan Laporan Keuangan TA. 2016; Terselenggaranya pembekalan sosialisasi penyusunan Laporan Keuangan bagi penyusun Laporan Keuangan SKPD	1 LKD 1 dokumen 1 dokumen	316.681.250	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2016 (Konsolidasian); Tersusunnya SE Bupati Pemalang tentang Penyusunan Laporan Keuangan TA. 2016; Terselenggaranya pembekalan sosialisasi penyusunan Laporan Keuangan bagi penyusun Laporan Keuangan SKPD	1 LKD 1 dokumen 1 dokumen	316.681.250	
4	04	6	8	Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan realisasi pendapatan bulanan dan realisasi belanja bulanan	24 laporan 24 laporan	162.730.700	Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan realisasi pendapatan bulanan dan realisasi belanja bulanan	24 laporan 24 laporan	162.730.700	
4	04	6	9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1 dokumen 1 dokumen 4 laporan 12 laporan 1 buku	152.906.050	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1 dokumen 1 dokumen 4 laporan 12 laporan 1 buku	152.906.050	
4	04	9		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase Terlaksananya Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran PD	80%	150.000.000	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase Terlaksananya Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran PD	80%	150.000.000	
4	04	9	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya Renja, RKA, RKAP, DPA, dan DPPA SKPD	10 dok 3 dok	150.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya Renja, RKA, RKAP, DPA, dan DPPA SKPD	10 dok 3 dok	150.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg		
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	04	15		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	80%	8.798.831.500	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	80%	8.798.831.500	
4	04	15	2	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya jumlah buku standarisasi satuan harga & peru bahannya yg tercetak	2 dokumen	182.000.000	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya jumlah buku standarisasi satuan harga & peru bahannya yg tercetak	2 dokumen	182.000.000	
4	04	15	3	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Tersusunnya Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah dan buku saku ringkasan kebijakan akuntansi	1 perbup 1 buku	112.562.000	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Tersusunnya Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah dan buku saku ringkasan kebijakan akuntansi	1 perbup 1 buku	112.562.000	
4	04	15	4	Penyusunan sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya buku penatausahaan keuangan daerah	1 perbup	141.320.000	Penyusunan sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya buku penatausahaan keuangan daerah	1 perbup	141.320.000	
4	04	15	6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya jumlah buku Perda tentang APBD	1 perda	370.000.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya jumlah buku Perda tentang APBD	1 perda	370.000.000	
4	04	15	7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	1 perbup	100.000.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	1 perbup	100.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg		
Kode Urusan		Kode Program / Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	04	15	8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD	1 perda	430.000.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD	1 perda	430.000.000	
4	04	15	9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 perbup	96.000.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 perbup	96.000.000	
4	04	15	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tersusunnya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016; Terlaksananya proses pembahasan dan evaluasi Raperda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016; Tersusunnya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016	1 perda	375.512.500	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tersusunnya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016; Terlaksananya proses pembahasan dan evaluasi Raperda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016; Tersusunnya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016	1 perda	375.512.500	
4	04	15	11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tersusunnya Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD TA. 2016; Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016	1 perbup	63.250.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tersusunnya Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD TA. 2016; Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016	1 perbup	63.250.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg		
Kode Urusan		Kode Program / Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
4	04	15	15	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Bintek/Sosialisasi bagi pengurus barang	1 kali	132.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Bintek/Sosialisasi bagi pengurus barang	1 kali	132.000.000	
4	04	15	16	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pemalang	Terlaksananya pensertifikatan aset daerah dan papan identitas aset daerah	44 sertifikat 96 papan	250.000.000	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pemalang	Terlaksananya pensertifikatan aset daerah dan papan identitas aset daerah	44 sertifikat 96 papan	250.000.000	
4	04	15	20	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS	Tersusunnya laporan gaji dan laporan SPT PPh gaji PNSD Kabupaten Pemalang	12.400 dokumen	435.515.000	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS	Tersusunnya laporan gaji dan laporan SPT PPh gaji PNSD Kabupaten Pemalang	12.400 dokumen	435.515.000	
4	04	15	21	Pembayaran PBB Aset Daerah / Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembayaran PBB aset/ barang daerah	78 bidang	40.000.000	Pembayaran PBB Aset Daerah / Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembayaran PBB aset/ barang daerah	78 bidang	40.000.000	
4	04	15	22	Pendistribusian Barang Milik Daerah	Terdistribusikannya sarana prasarana aset/ barang daerah	4 kali	20.000.000	Pendistribusian Barang Milik Daerah	Terdistribusikannya sarana prasarana aset/ barang daerah	4 kali	20.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg		
Kode Urusan		Kode Program / Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
4	04	15	23	Penetapan status pengguna BMD, SK Pengurus barang RKBU dan RKPBU	Jumlah buku Keputusan Bupati tentang penunjukkan pengurus barang, Jumlah RKBU/RKPBU perangkat daerah yang tersusun selama satu tahun, Jumlah buku penetapan status pengguna BMD	1 SK 2 SK 2 dokumen	115.500.000	Penetapan status pengguna BMD, SK Pengurus barang RKBU dan RKPBU	Jumlah buku Keputusan Bupati tentang penunjukkan pengurus barang, Jumlah RKBU/RKPBU perangkat daerah yang tersusun selama satu tahun, Jumlah buku penetapan status pengguna BMD	1 SK 2 SK 2 dokumen	115.500.000	
4	04	15	24	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Semesteran BMD dalam satu tahun	2 laporan 2 laporan	35.000.000	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Semesteran BMD dalam satu tahun	2 laporan 2 laporan	35.000.000	
4	04	15	25	Penyelesaian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	Jumlah Pelaksanaan Penghapusan BMD dalam satu tahun	2 laporan	150.000.000	Penyelesaian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	Jumlah Pelaksanaan Penghapusan BMD dalam satu tahun	2 laporan	150.000.000	
4	04	15	26	Penyusunan laporan realisasi penerimaan BPKAD	Jumlah laporan realisasi penerimaan jasa giro dan bunga deposito	12 laporan	75.000.000	Penyusunan laporan realisasi penerimaan BPKAD	Jumlah laporan realisasi penerimaan jasa giro dan bunga deposito	12 laporan	75.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg		
Kode Urusan		Kode Program / Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	04	15	31	Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Tersusunnya Perbup tentang Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan Daerah (penyempurnaan); Tersusunnya Perbup tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2017 Tersusunnya buku saku petunjuk manual pengoperasian SIMDA Keuangan;	1 perbup	135.300.000	Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Tersusunnya Perbup tentang Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan Daerah (penyempurnaan); Tersusunnya Perbup tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2017 Tersusunnya buku saku petunjuk manual pengoperasian SIMDA Keuangan;	1 perbup	135.300.000	
4	04	15	35	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah	Terselenggaranya peningkatan pengetahuan PNS yang mengikuti Bintek Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100 orang	120.000.000	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah	Terselenggaranya peningkatan pengetahuan PNS yang mengikuti Bintek Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100 orang	120.000.000	
4	04	15	54	Pengelolaan Kerugian Daerah	Terlaksananya penyelesaian kerugian daerah atas hasil temuan pengawasan	4 laporan	87.872.000	Pengelolaan Kerugian Daerah	Terlaksananya penyelesaian kerugian daerah atas hasil temuan pengawasan	4 laporan	87.872.000	
4	04	15	55	Sosialisasi/Peningkatan SDM/pengurus barang/Simda BMD	Jumlah Pengelola barang PD yang mengikuti sosialisasi tentang pengelolaan BMD	3 kali	200.000.000	Sosialisasi/Peningkatan SDM/pengurus barang/Simda BMD	Jumlah Pengelola barang PD yang mengikuti sosialisasi tentang pengelolaan BMD	3 kali	200.000.000	
4	04	15	56	Pemantauan, Pemanfaatan aset/barang milik daerah	Terlaksananya kegiatan pemantauan, pemanfaatan aset/BMD dalam satu tahun	12 laporan	120.000.000	Pemantauan, Pemanfaatan aset/barang milik daerah	Terlaksananya kegiatan pemantauan, pemanfaatan aset/BMD dalam satu tahun	12 laporan	120.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg		
Kode Urusan		Kode Program / Kegiatan		Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
4	04	15	57	Penyusunan laporan semesteran barang milik daerah (konsolidasi)	Jumlah Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi) yang tersusun selama satu tahun	1 laporan	300.000.000	Penyusunan laporan semesteran barang milik daerah (konsolidasi)	Jumlah Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi) yang tersusun selama satu tahun	1 laporan	300.000.000	
4	04	15	58	Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Mutasi Deposito Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Dana Transfer Daerah	12 laporan 12 laporan	115.000.000	Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Mutasi Deposito Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Dana Transfer Daerah	12 laporan 12 laporan	115.000.000	
4	04	15	59	Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS	Jumlah Laporan Bahan Penyusunan KUA PPAS selama satu tahun	2 laporan	141.000.000	Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS	Jumlah Laporan Bahan Penyusunan KUA PPAS selama satu tahun	2 laporan	141.000.000	
4	04	15	62	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpenuhi	18 unit	4.456.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpenuhi	18 unit	4.456.000.000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia;
- b. Meningkatkan pelayanan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Meningkatkan disiplin dan kinerja ASN di BPKAD;
- d. Mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan aset daerah dan jasa giro/bunga deposito;
- e. Meningkatkan Akurasi Pengelolaan Aset Daerah yaitu penyajian data pada Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan data aset yang dikuasai.
- f. Meningkatkan pengamanan aset khususnya tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan cara memfasilitasi proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- g. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Ekuitas (LE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kabupaten Pemalang, agar dapat dipertahankan hasil opini BPK RI “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” yang telah diraih 2 tahun berturut-turut.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yaitu :

“Peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah”

3.2.1. Tujuan Renja BPKAD

Adapun tujuan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

1. Memperkuat eksistensi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai lembaga yang berkualitas, berkompeten dan

meningkatkan kapabilitas dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

2. Meningkatkan disiplin dan mengembangkan kemampuan ASN BPKAD dalam memberikan pelayanan yang prima;

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran sebagai suatu hasil yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran ini merupakan bagian internal dalam proses perencanaan stratejik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Oleh karena itu dalam menunjang tercapainya Sasaran tersebut diatas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya dirumuskan

3.2.2. Sasaran Renja BPKAD

Ada pun sasaran Renja BPKAD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya *human performance* (kemampuan dan kemauan aparatur) dalam meningkatkan produktifitas kinerja;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD) WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ”

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam proses perencanaan stratejik, karena didalamnya terkandung rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam menetapkan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta pencermatan terhadap lingkungan strategis yang dihadapi.

Pemilihan strategi sebagai suatu proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling penting. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana kerja khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang

sifatnya spesifik tentang bagaimana sumber daya aparatur harus mengelolanya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Sebagai suatu alat strategi, kebijakan dan program akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran dalam tahun anggaran.

3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel :3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Kabupaten Pematang Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Rencana 2020

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11			
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				15.163.174.000				15.163.174.000			
4	<u>Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan</u> <u>Bidang Keuangan</u>				15.163.174.000				15.163.174.000			
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		80%	2.502.000.000			90%	2.502.000.000			
4	04	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim dan jumlah surat yang diterima dalam satu tahun	BPKAD	8.000 surat/ notdin	30.000.000	APBD		8.000 surat/ notdin	30.000.000
4	04	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, air, listrik dan internet dalam satu tahun	BPKAD	4 jenis	610.000.000	APBD		4 jenis	610.000.000
4	04	1	5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang di asuransikan	BPKAD	185 unit	830.000.000	APBD		185 unit	830.000.000
4	04	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terlaksananya perijinannya selama satu tahun	BPKAD	53 unit	15.000.000	APBD		53 unit	15.000.000
4	04	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA, KPA dan Bendahara yang tersusun selama satu tahun	BPKAD	12 SK 12 Laporan 12 kali	270.000.000	APBD		12 SK 12 Laporan 12 kali	270.000.000
4	04	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan, Keindahan dan Ketertiban kantor selama satu tahun	BPKAD	4 orang	85.000.000	APBD		4 orang	85.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	6	7	8	9	10	11
4	04	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja yang diperbaiki selama satu tahun	BPKAD	10 unit	15.000.000	APBD		10 unit	15.000.000
4	04	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang di sediakan	BPKAD	1 paket, 50 buah toner	90.000.000	APBD		1 paket, 50 buah toner	90.000.000
4	04	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	BPKAD	6 kali, 1 paket, 12 buah	50.000.000	APBD		6 kali, 1 paket, 12 buah	50.000.000
4	04	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang di sediakan	BPKAD	12 bulan	15.000.000	APBD		12 bulan	15.000.000
4	04	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan di sediakan	BPKAD	4 jenis	22.000.000	APBD		4 jenis	22.000.000
4	04	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran, majalah, dan buku perundang-undangan yg disediakan	BPKAD	2 jenis	25.000.000	APBD		2 jenis	25.000.000
4	04	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jml makanan & minuman yg disediakan	BPKAD	4 jenis	135.000.000	APBD		4 jenis	135.000.000
4	04	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam & keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	BPKAD	2 jenis	450.000.000	APBD		2 jenis	450.000.000
4	04	1	21	Penyusunan Laporan Realisasi penerimaan dana transfer daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan dana transfer	BPKAD	12 lap, 8 lap	190.000.000	APBD		12 lap, 8 lap	190.000.000
4	04	1	22	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan	Jumlah laporan administrasi penyaluran bantuan keuangan sosial, hibah, bunga, belanja tidak terduga kepada masyarakat dan pengeluaran pembiayaan SKPD	BPKAD	24 lap, 24 lap, 2 lap, 2.750 berkas	350.000.000	APBD		24 lap, 24 lap, 2 lap, 2.750 berkas	350.000.000
4	20	1	23	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan perbendaharaan	Jumlah penerbitan SP2D dan penelitian	BPKAD	11.000 sp2d	349.627.000	APBD		11.000 sp2d	349.627.000
4	20	1	24	Penyediaan jasa administrasi keuangan penyediaan dana dan anggaran kas	Jumlah surat penyediaan dana SKPD yang terselesaikan	BPKAD	175 SPD, 100 dok	123.000.000	APBD		175 SPD, 100 dok	123.000.000
4	20	1	27	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Gaji	Jumlah SKPP yang diterbitkan	BPKAD	500 skpp	85.000.000	APBD		500 skpp	85.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11		
4	20	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		80%	4.635.000.000		90%	4.635.000.000
4	20	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpenuhi	BPKAD	-	-	APBD	-	-
4	20	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPKAD	3 unit	25.500.000	APBD	3 unit	25.500.000
4	20	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dalam Satu tahun	BPKAD	-	-	APBD	-	-
4	20	2	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler yang terpenuhi	BPKAD	17 unit	42.050.000	APBD	17 unit	42.050.000
4	04	2	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang tersedia	BPKAD	9 unit	92.000.000	APBD	9 unit	92.000.000
4	04	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	BPKAD	2 lokal	200.000.000	APBD	2 lokal	200.000.000
4	04	2	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	BPKAD	1 unit	50.000.000	APBD	1 unit	50.000.000
4	04	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	BPKAD	52 unit	155.000.000	APBD	52 unit	155.000.000
4	04	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	BPKAD	33 unit	30.000.000	APBD	33 unit	30.000.000
4	04	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	BPKAD	1 unit	15.000.000	APBD	1 unit	15.000.000
4	04	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpelihara	BPKAD	1 paket	10.000.000	APBD	1 paket	10.000.000
4	04	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah peralatan komputer dan perlengkapannya yang terpelihara	BPKAD	75 unit	20.000.000	APBD	75 unit	20.000.000
4	04	2	45	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi	Jumlah software dan sistem yang dipelihara	BPKAD	2 software	211.035.000	APBD	2 software	211.035.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	6	7	8	9	10	11
4	04	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		80%	360.000.000			90%	360.000.000
4	04	5	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang ikut sosialisasi	BPKAD	85 orang	860.906.050	APBD		85 orang	860.906.050
4	04	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		80%	656.000.000			90%	656.000.000
4	04	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Tersusunnya jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPKAD	1 dok, 15 dok, 1 dok	64.000.000	APBD		1 dok, 15 dok, 1 dok	64.000.000
4	04	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	BPKAD	2 dokumen	20.000.000	APBD		2 dokumen	20.000.000
4	04	6	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	BPKAD	1 lap, 1 dok, 1 dok	54.000.000	APBD		1 lap, 1 dok, 1 dok	54.000.000
4	04	6	5	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran konsolidasi	Tersedianya jumlah laporan semesteran dan prognosis daerah; Tersedianya jumlah laporan bulanan dan triwulan; Tersedianya jumlah laporan DTH RTH; Tersedianya jml laporan TB/ UB	BPKAD	2 dokumen, 12 laporan	103.812.500	APBD		2 dokumen 12 laporan	103.812.500
4	04	6	7	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2016 (Konsolidasian); Tersusunnya SE Bupati Pemalang tentang Penyusunan Laporan Keuangan TA. 2016; Terselenggaranya pembekalan sosialisasi penyusunan Laporan Keuangan bagi penyusun Laporan Keuangan SKPD	BPKAD	1 LKD 1 dokumen 1 dokumen	316.681.250	APBD		1 LKD 1 dokumen 1 dokumen	316.681.250

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11			
4	04	6	8	Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan realisasi pendapatan bulanan dan realisasi belanja bulanan	BPKAD	24 laporan 24 laporan	162.730.700	APBD		24 laporan 24 laporan	162.730.700
4	04	6	9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	BPKAD	1 dokumen 1 dokumen 4 laporan 12 laporan 1 buku	142.000.000	APBD		1 dokumen 1 dokumen 4 laporan 12 laporan 1 buku	142.000.000
4	04	9		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase Terlaksananya Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran PD		80%	150.000.000			90%	150.000.000
4	04	9	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya Renja, RKA, RKAP, DPA, dan DPPA SKPD	BPKAD	10 dok 3 dok	150.000.000	APBD		10 dok 3 dok	150.000.000
4	04	15		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		80%	3.906.000.000			90%	3.906.000.000
4	04	15	2	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya jumlah buku standarisasi satuan harga & peru bahannya yg tercetak	BPKAD	2 dokumen	182.000.000	APBD		2 dokumen	182.000.000
4	04	15	3	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Tersusunnya Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah dan buku saku ringkasan kebijakan akuntansi	BPKAD	1 perbup 1 buku	112.562.000			1 perbup 1 buku	112.562.000
4	04	15	4	Penyusunan sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya buku penatausahaan keuangan daerah	BPKAD	1 perbup	141.320.000	APBD		1 perbup	141.320.000
4	04	15	6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya jumlah buku Perda tentang APBD	BPKAD	1 perda	370.000.000	APBD		1 perda	370.000.000
4	04	15	7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	BPKAD	1 perbup	100.000.000	APBD		1 perbup	100.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	6	7	8	9	10	11
4	04	15	8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD	BPKAD	1 perda	430.000.000	APBD		1 perda	430.000.000
4	04	15	9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	1 perbup	96.000.000	APBD		1 perbup	96.000.000
4	04	15	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tersusunnya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016; Terlaksananya proses pembahasan dan evaluasi Raperda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016; Tersusunnya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016	BPKAD	1 perda	375.512.500	APBD		1 perda	375.512.500
4	04	15	11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tersusunnya Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD TA. 2016; Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016	BPKAD	1 perbup	63.250.000	APBD		1 perbup	63.250.000
4	04	15	15	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Bintek/Sosialisasi bagi pengurus barang	BPKAD	1 kali	132.000.000	APBD		1 kali	132.000.000
4	04	15	16	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pematang	Terlaksananya pensertifikatan aset daerah dan papan identitas aset daerah	BPKAD	44 sertifikat 96 papan	250.000.000	APBD		44 sertifikat 96 papan	250.000.000
4	04	15	20	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS	Tersusunnya laporan gaji dan laporan SPT PPh gaji PNSD Kabupaten Pematang	BPKAD	12.400 dokumen	435.515.000	APBD		12.400 dokumen	435.515.000
4	04	15	21	Pembayaran PBB Aset Daerah / Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembayaran PBB aset/ barang daerah	BPKAD	78 bidang	40.000.000	APBD		78 bidang	40.000.000
4	04	15	22	Pendistribusian Barang Milik Daerah	Terdistribusikannya sarana prasarana aset/ barang daerah	BPKAD	4 kali	20.000.000	APBD		4 kali	20.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	6	7	8	9	10	11
4	04	15	23	Penetapan status pengguna BMD, SK Pengurus barang RKBU dan RKPBU	Jumlah Keputusan Bupati tentang penunjukkan pengurus barang, Jumlah RKBU/RKPBU perangkat daerah yang tersusun, Jumlah Buku Penetapan Status Pengguna BMD	BPKAD	1 SK 2 SK 2 dokumen	115.500.000	APBD		1 SK 2 SK 2 dokumen	115.500.000
4	04	15	24	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Semesteran BMD dalam satu tahun	BPKAD	2 laporan 2 laporan	35.000.000	APBD		2 laporan 2 laporan	35.000.000
4	04	15	25	Penyelesaian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	Terlaksananya penghapusan BMD dalam satu tahun	BPKAD	2 laporan	150.000.000	APBD		2 laporan	150.000.000
4	04	15	26	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan BPKAD	Jumlah laporan penerimaan realisasi jasa giro dan bunga deposito	BPKAD	12 laporan	75.000.000	APBD		12 laporan	75.000.000
4	04	15	31	Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Tersusunnya Perbup tentang Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan Daerah (penyempurnaan); Tersusunnya Perbup tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2017 Tersusunnya buku saku petunjuk manual pengoperasian SIMDA Keuangan;	BPKAD	1 perbup	135.300.000	APBD		1 perbup	135.300.000
4	04	15	35	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah	Terselenggaranya peningkatan pengetahuan PNS yang mengikuti Bintek Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	100 orang	120.000.000	APBD		100 orang	120.000.000
4	04	15	54	Pengelolaan Kerugian Daerah	Terlaksananya penyelesaian kerugian daerah atas hasil temuan pengawasan	BPKAD	4 laporan	87.872.000	APBD		4 laporan	87.872.000
4	04	15	55	Sosialisasi/Peningkatan SDM/pengurus barang/Simda BMD	Jumlah Pengelola barang PD yang mengikuti sosialisasi tentang pengelolaan BMD	BPKAD	3 kali	200.000.000	APBD		3 kali	200.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	6	7	8	9	10	11
4	04	15	56	Pemantauan, Pemanfaatan aset/barang milik daerah	Terlaksananya kegiatan pemantauan, pemanfaatan aset/BMD dalam satu tahun	BPKAD	12 laporan	120.000.000	APBD		12 laporan	120.000.000
4	04	15	57	Penyusunan laporan semesteran barang milik daerah (konsolidasi)	Jumlah Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi) yang tersusun selama satu tahun	BPKAD	1 laporan	300.000.000	APBD		1 laporan	300.000.000
4	04	15	58	Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Mutasi Deposito Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Dana Transfer Daerah	BPKAD	12 laporan 12 laporan	115.000.000	APBD		12 laporan 12 laporan	115.000.000
4	04	15	59	Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS	Jumlah Laporan Bahan Penyusunan KUA PPAS selama satu tahun	BPKAD	2 laporan	141.000.000	APBD		2 laporan	141.000.000
4	04	15	62	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional SKPD oleh SKPKD	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	BPKAD	18 unit	4.456.000.000	APBD		18 unit	4.456.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 ini merupakan target, kebutuhan, anggaran dan indikator kinerja.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagai dasar dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019. Selain itu, Rencana Kerja Tahun 2019 juga memiliki fungsi evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018. Kegiatan yang mengalami perubahan kebutuhan akan ditambah anggarannya sesuai kemampuan keuangan, sedangkan kegiatan yang pelaksanaannya kurang maksimal di evaluasi dengan penggeseran anggaran ke kegiatan lain yang dapat dilaksanakan optimal.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 merupakan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja BPKAD 2018 yang diharapkan dapat mencapai target yang telah disesuaikan tersebut dengan optimal.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019, maka diharapkan BPKAD lebih maksimal dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Pemalang 2016-2021 dengan pelaksanaan kegiatan yang lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Pemalang, 30 Oktober 2018

Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang



W JOKO SUSILO, SH, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19661224 199203 1 005